BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pemerintahan Indonesia Sebelum Amademen UUD 1945

   Sistem pemerintahan Indonesia pernah mengalami perubahan sistem terpakai, baik menggunakan Sistem pemerinahan Presidensial maupun Sistem pemerintahan parlementer, Sistem pemerintahan Presidensial awalnya di gunakan pemerintahan orde lamanamun mengalami gejolak dari dalam (adanya ketidakpuasan dari tokoh-tokoh tentang sistem di pakai) maupun dari luar (agresi militer Belanda) membuat para tokoh merubah kembali dari sistem parlemeter ke sistem presidensial.

2. Sistem pemerintahan Indonesia Sesudah Amademen UUD 1945

   Sistem pemerintahan Indonesia sesudah Amandemen UUD 1945 mejadi UUD RI 1945 memakai sistem pemerintahan Presidensial walaupun tidak murni sistem presidensial atau pelaksaan melenceng dari sistem presidensial sehingga memunculkan nama baru untuk sistem pemerintahan Indonesia, yang oleh para ahli hukum tata Negara.

   Sesudah diamandemennya UUD tahun 1945, diperoleh gambaran bahwa sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia bercirikan sistem pemerintahan Presidensil Konstitusional yaitu “suatu sistem pemerintahan yang penyelenggaraan pemerintahan negaranya

dilaksanakan oleh presiden dimana tugas dan kewenangan presiden diatur dalam konstitusi baik dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan maupun sebagai penyelenggara negara dengan arah pertanggungjawabannya adalah terhadap konstitusi.

B. Saran

1. Sistem pemerintahan Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945.

   Pada awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 di butuhkan suatu sistem pemerintahan yang sedikit otoriter karena kemerdekaan masa rawan akan terjadinya perpecahan antar bangsa, suku dan agama, perlu suatu sistem untuk merendam gejolak ketidakpuasan golongan tertentu

   Setelah masyarakat sudah memahami demokrasi berkebebasan pendapat maka sistem pemerintahan harus di ubah ke demokrasi yang benar-benar nyata tanpa tekanan dari penguasa pemerintahan yang menggunakan sistem pemerintahan melanggengkan kekuasaannya.

2. Sistem pemerintahan Indonesia Sesudah Amandemen UUD 1945

   Sistem Pemerintahan Indonesia harus menjalankan sistem presidensial karena presiden sebagai kepala Negara memilliki kekuasaan tertinggi tidak boleh kekuasaan lebih tinggi dari presiden mengakibatkan kekuasaan terjadi benturan antar lembaga dan presiden merasa kekuasaan akan di mazkulkan akan melakukan berbagai cara untuk melemahkan lembaga-lembaga lainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/literasi

Mahmuzar, 2010, *Sistem pemerintahan Indonesia : menurut UUD 45 sebelum dan sesudah Amandemen*, Nusamedia, Bandung

Isra, Saldi, 2019, *Sistem Pemerintahan Indonesia: pergulatan ketatanegaraan menuju sistem pemerintahan Presidensial*, RajaGrafindo, Depok

Gaffar, **Afan**, 2002, *Prospek Reformasi politik: Perdebatan tentang amandemen undang-undang dasar Negara*, Pustaka Pelajar, Jakarta,

Assiddiqie, Jimly, 1996, *Pergumulan Peran pemerintah dan parlemen dalam sejarah: Telaah perbandingan konstitusi berbagai Negara*, UI Press, Jakarta.

Budiarjo, Miriam, 1999**,** *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta.

Martosoewignyo, Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Pustaka Alumni, Bandung.

Zulkarnain, **Ridlwan**, 2015, *Cita demokrasi dalam politik hukum pengawasan DPR terhadap konstitusi*, Gramedia, Jakarta

Montesqueie, (tt), *The Spirit of the law*, Hafner Press, London.

Mahfud MD, Mohammad, 1999, *Hukum dan pilar-pilar demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta

Mahfud MD, Mohammad, 1993, *Dasar dan Struktur ketataegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta

Thaib, Dahlan, 2000, *DPR dalam sistem ketataegaraan Indoesia***,** cet. Kedua, Liberty, Yogyakarta**.**

Alrasid, Harun, 1997, *Pemilihan Presiden dan Pergantian Presiden dalam Hukum Posiif Indonesia,* YLBHI, Jakarta

Pringgodigdo, A.K., 1969, *Perubahan kabinet Presidentil menjadi kabinnet parlementer,* UGM, Yogyakarta

Sanusi, Achmad, 1958, *Perkembangan Sistem Pemeritahan Negara Republik Indonesia 1945-1958,* Unpad, Bandung.

Saragih, Bintan R. & Kusnardi M, 1990, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut UUD 1945,*Gramedia, Jakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sesudah Amandemen kedua tahun 2000, Sinar Grafika, Jakarta.

Keputusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2001, CV. Mini Jaya Abadi, Jakarta

Tap. MPR RI No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan Dan Hubugan Tata `Kerja Lembaga Tertinggi Dan Tinggi Negara.

Tap. MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Kolusi Korupsi Dan Nepotisme.

Tap. MPR RI No. V/MPR/2001 tentang Peraturan Tata Tertib MPR

C. Internet, artikel dan lain lain

id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan

Magenda, Burhan Djabir, 2001, Dinamika Hubungan Eksekutif-legislatif Di Indonesia, Civility, Vol 1, No 1, Juli-September

LAMPIRAN - LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI
ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

Form-03 FH-UM.MTR-02

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : NISFU SYA'BAN
NIM : 615 11A0059
PROG. STUDI : ILMU HUKUM
IPK : 3,09

JUDUL

1. Sistem Pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen undang-undang dasar (UUD) 1945
2. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden menurut UUD 1945 dalam konteks demokrasi
3. Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruh Perkembangan Indonesia

Mengetahui Dosen PA,

(SAHRUL, SH. MH)
NIDN. 0831128107

Mataram. 21 April 2019
Mahasiswa Pemohon,

(NISFU SYA'BAN)

Mengetahu
Dekan/ Ketua Prodi,

(Anis Prima Dewi SH. MH)
NIDN. 0827067501

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI
ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : NISFU SYA'BAN

NIM : 615 11A 0059

PROG. STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL DISETUJUI :

Sistem Pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah Amandemen undang-undang dasar 1945

Mataram, 30 April 2019
Mahasiswa Pemohon,

NISFU SYA'BAN
NIM. 615 11A 0059

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

(Anies Prima Dewi, MH)
NIDN. 0828078507

Dosen Pembimbing Kedua,

(Ady Supriyadi, SH.MH)
0803128501

Tanggal Penetapan 30 April 2019
Dekan/ Ketua Prodi,

(Anies Prima Dewi, SH. MH)
NIDN. 0828078507

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : NISFU SYAIBAN

NIM : 615 11A 0059

PROG. STUDI : ILMU HUKUM

IPK : 3,09

DOSEN PS I : Anies Prima Dewi, SH.MH DOSEN PS II : Ady Supriyadin, SH. MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	6/1/20	Memperbaiki rumusan masalah dan kata-kata		
2	9/1/20	menambahkan footnote dan isi Pendahuluan		
3	16/3/20	memperbaiki isi Pendahuluan dan metode Penelitian		
4	17/4/20	merevisi hasil Penelitian		
5	1/6/20	menambahkan isi dari buku-buku dan Jurnal		
6	4/6/20	mengubah beberapa hasil dari Penelitian		
7	21/7/20	menambahkan footnote dalam hasil pembahasan		
8	10/8/20	mengurangi kata-kata kesimpulan dan saran		

Mengetahu
Dekan/Ketua Prodi,

(Anies Prima Dewi, SH.MH)

NIDN: 0820078501